

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Diskrepansi antara retorika progresif dan realitas di Meksiko terjadi karena keputusan pengadopsian Kebijakan Luar Negeri Feminis sepenuhnya diproduksi dan digerakkan oleh elit Meksiko khususnya elit Kementerian Luar Negeri (SRE) tanpa melibatkan para aktivis feminis di dalamnya. Sebagai sebuah kebijakan progresif yang memprioritaskan kesetaraan gender, Kebijakan Luar Negeri Feminis menuntut adanya keselarasan antara kebijakan ini dengan implementasi nyata di tingkat domestik. Namun, karena proses pengadopsian FFP Meksiko berjalan secara sepihak dari atas (*top-down*), kebijakan ini akhirnya tidak memberikan implikasi atau perubahan nyata di dalam negeri dengan kasus *femicide* Meksiko yang masih mengalami tren konsisten setelah pengadopsian FFP dilakukan.

Apabila dilihat melalui lima pilar FFP Meksiko yang dipromosikan oleh elit SRE, secara substansial masih belum memadai untuk menjawab krisis *femicide* yang terjadi di dalam negeri. Kelima pilar tersebut dirancang dengan orientasi ke luar, yakni untuk memandu perilaku Meksiko di panggung multilateral, bukan sebagai kerangka kebijakan yang mengikat aktor-aktor domestik untuk mengambil tindakan konkret dalam melindungi perempuan. Pasca FFP diadopsi, tidak ada satu pun dari kelima pilar ini yang memberikan implikasi perubahan penanganan kekerasan gender secara struktural. Dengan demikian,

bahkan jika FFP diimplementasikan secara penuh sekalipun, kelima pilarnya sendiri tidak dirancang untuk menyentuh akar persoalan *femicide* di Meksiko.

Ketidakselarasan ini juga dipicu dari adanya dua arus informasi yang bertolak belakang. Di satu sisi, dunia internasional melihat pencapaian Meksiko dalam mempromosikan kesetaraan gender lewat pesan dominan yang sangat progresif serta partisipasi aktif yang konsisten menunjukkan komitmen Meksiko dalam menjunjung tinggi kesetaraan gender yang diproduksi oleh elit SRE. Sebaliknya, di dalam negeri, Presiden AMLO yang sedang menjalankan kebijakan domestiknya secara intensif memproduksi pesan tandingan yang cenderung tidak berpihak pada gerakan feminis dan menunjukkan sikap-sikap yang bertentangan dengan agenda progresif yang disampaikan di panggung internasional.

Akibat perbedaan informasi ini, opini yang terbentuk pada publik internasional dan domestik terbelah menjadi dua. Publik internasional, yang memorinya bersih dari kontradiksi domestik, hanya menarik informasi dari pidato diplomatik dan partisipasi aktif Meksiko dalam forum kesetaraan gender. Hal ini membuahkan legitimasi global yang tinggi, yang mengapresiasi keberhasilan Meksiko menjalankan komitmennya pada kesetaraan gender. Terbukti dengan keberhasilan Meksiko menduduki peringkat ketiga dunia dalam *Feminist Foreign Policy Index* di tahun 2023. Di sisi lain, masyarakat dan kelompok aktivis feminis domestik menarik opini mereka berdasarkan ingatan yang paling segar dan paling sering mereka alami, yaitu berupa akumulasi kasus *femicide* yang terus mengkhawatirkan, Presiden yang tidak memihak kelompok feminis,

kebijakan-kebijakan yang mengancam hak-hak perempuan di dalam negeri dan pengabaian tuntutan untuk menyelesaikan masalah kekerasan gender struktural.

Pada akhirnya, keberadaan FFP Meksiko lebih didominasi oleh kepentingan para elit untuk membangun citra Meksiko sebagai negara feminis di luar negeri daripada komitmen nyata untuk menjadikan kebijakan ini solusi transformasi radikal untuk menyelesaikan isu ketidaksetaraan gender secara struktural di dalam negeri. Melalui arus pemisahan informasi, pemerintah Meksiko berhasil membangun citra yang baik di panggung global hingga mendapat pujian dari berbagai negara untuk FFP yang diadopsi dan komitmennya namun pencapaian tersebut pada realitasnya tidak memberikan implikasi nyata perubahan substantif bagi penyelesaian krisis *femicide* dan perlindungan hak-hak perempuan di domestik Meksiko.

4.2. Saran

Mengingat penelitian ini dibatasi untuk melihat bagaimana diskrepansi Kebijakan Luar Negeri Feminis (FFP) terbentuk melalui penyaringan opini publik pada masa pemerintahan Presiden Andrés Manuel López Obrador (AMLO), maka penulis menyarankan perlunya penelitian lanjutan mengenai bagaimana Meksiko meneruskan pengadopsian FFP di bawah periode kepemimpinan presiden berikutnya. Penelitian masa depan tersebut ditujukan untuk mengetahui apakah di masa mendatang narasi FFP ini dapat betul-betul bertransformasi menjadi sebuah solusi nyata dalam menyelesaikan akar masalah perempuan, atau justru tetap terjebak sebagai agenda pencitraan elit politik semata. Selanjutnya, demi

mewujudkan komitmen tersebut, Pemerintah Meksiko, khususnya Kementerian Luar Negeri (SRE), harus segera menghentikan formulasi kebijakan yang bersifat elitis dan *top-down* dengan secara aktif melibatkan organisasi masyarakat sipil, komunitas aktivis feminis, dan gerakan akar rumput ke dalam proses dialog nasional yang inklusif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan untuk agenda progresif seperti FFP. Bersamaan dengan itu, komitmen internasional ini wajib dibarengi dengan reformasi domestik dan penegakan hukum yang tegas demi menanggulangi epidemi *femicide* serta kekerasan gender di dalam negeri, sehingga di masa depan FFP Meksiko tidak lagi terjebak sebagai instrumen pencitraan semata.